



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR **173** TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA DAN PELAKSANA
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 523 tahun 1990 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengolahan Program P3KT Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang berpedoman kepada Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 tahun 1990 perlu disempurnakan sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 tahun 1992 ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a Konsiderans meninmbang di atas perlu dibentuk Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 dan 30 tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 267 tahun 1986 tentang Pembentukan Tim Pengarah P3KT Propinsi Jawa Timur ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 266 tahun 1990 tentang Komisi Pembina Program

Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN : Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA DAN PELAKSANA PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Organisasi Pengelola dan Pelaksana.

Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini, dan selanjutnya disebut Organisasi Pengelola dan Pelaksana P3KT.

Pasal 2

- (1). Organisasi Pengelola dan Pelaksana P3KT sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, merupakan Organisasi Fungsional dengan kedudukan sebagai unsur staf yang membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam pengelolaan dan pelaksanaan P3KT.

- (2) Organisasi Pengelola dan Pelaksana P3KT bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

- (1) Organisasi Pengelola dan Pelaksanaan Program dan Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu terdiri :
1. Tim Koordinasi P3KT Kabupaten Daerah Tingkat II ;
 2. Unit Manajemen Program ;
 3. Unit Manajemen Pelaksana Proyek ;
 4. Unit Manajemen Keuangan.
- (2) Susunan keanggotaan Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program dan Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana terlampir.

Pasal 4

Kedudukan, tugas dan fungsi Organisasi Pengelola dan Pelaksana P3KT dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini adalah:

- a. Tim koordinasi P3KT Kabupaten Daerah Tingkat II :
- Tim koordinasi P3KT Kabupaten Daerah Tingkat II berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Tim Koordinasi yang membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam mengkoordinasikan program pembangunan di bidang perkotaan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
 - Tim Koordinasi P3KT Kabupaten Daerah Tingkat II mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam bidang :
 1. Koordinasi penyiapan dan pelaksanaan P3KT di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 2. Koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengelolaan P3KT di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

3. Perumusan kebijaksanaan operasional dan memberikan petunjuk pelaksanaan pembangunan prasarana kota.

- Tim Koordinasi P3KT Kabupaten Daerah Tingkat II mempunyai fungsi membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam melaksanakan koordinasi bagi penetapan kebijaksanaan, integrasi langkah - langkah kebijaksanaan untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan kelancaran pembangunan perkotaan serta mengarahkan kebijaksanaan operasional pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu.

b. Unit Manajemen Program.

- Unit Manajemen Program berkedudukan di Bappeda Tingkat II Nganjuk sebagai Unit Manajemen Program di bidang perkotaan.
- Unit Manajemen Program mempunyai tugas membantu Ketua Bappeda Tingkat II dalam bidang :
 1. Pengendalian dan koordinasi pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu yang meliputi Investasi, Program Peningkatan Pendapatan Daerah dan Program Pengembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah ;
 2. Koordinasi penyusunan Rencana Tahunan Pembangunan Prasarana Kota Terpadu dari semua sumber dana dan Rencana Tahunan Pembangunan lainnya ;
 3. Koordinasi dengan dinas - dinas dan Instansi terkait di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Penyusunan laporan pelaksanaan dan perkembangan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan penyampaian laporan tersebut kepada :
 - a). Bupati Kepala Daerah Tingkat II ;

- b). Ketua Bappeda Kabupaten Daerah tingkat II ;
- c). Unit Pengendali Program.

- Unit Manajemen Program mempunyai fungsi membantu Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II dalam melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu.

c. Unit Manajemen Pelaksana Proyek.

- Unit Manajemen Pelaksana Proyek berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Unit Manajemen Pelaksanaan Proyek di bidang perkotaan, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II.

- Unit Manajemen Pelaksana Proyek mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II dalam bidang :

1. Penyusunan dan pelaksanaan Proyek P3KT, yang meliputi kegiatan penyusunan dan pengendalian Proyek Tahunan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek P3KT di Kabupaten Daerah Tingkat II.
2. Pengawasan pelaksanaan, yang meliputi kegiatan pemantauan (monitoring) dan penilaian (evalusai) dalam rangka memacu dan menertibkan pelaksanaan pembangunan fisik oleh proyek - proyek.
3. Pembinaan, yang meliputi kegiatan meningkatkan proyek melalui Program Pendidikan dan Latihan, Penempatan Tenaga Konsultan dan Bimbingan Tehnis Pelaksanaan.
4. Pengaturan, yang meliputi kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bagi proyek yang melakukan pelaksanaan pembangunan fisik.
5. Pelaporan, yang meliputi kegiatan penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan program dan

kemajuan pekerjaan sesuai proyek P3KT dan penyampaian laporan kepada :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II ;
- b. Unit Manajemen Program ;
- c. Unit Pengendali Pelaksana Proyek.

- Unit Manajemen Pelaksanan Proyek mempunyai fungsi mengelola pelaksanaan proyek - proyek P3KT agar tercapai ketepatan jadwal dan ketaatan pada persyaratan teknis dan administrasi dalam proses pelaksanaan angsuran dan pembangunan fisik setiap proyek.

d. Unit Manajemen Keuangan.

- Unit Manajemen Keuangan berkedudukan di Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, sebagai manajemen keuangan dibidang perkotaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

- Unit Manajemen Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam :

1. Koordinasi semua bendaharawan proyek di Daerah Tingkat II dari berbagai sumber dana yang berkaitan dengan P3KT ;
2. Konsolidasi semua informasi keuangan proyek P3KT di Daerah Tingkat II dari semua sumber dana ;
3. Penyediaan semua informasi yang berhubungan dengan keuangan Proyek P3KT di Kabupaten Daerah Tingkat II, mengevaluasi proses data dan memelihara keakuratan data untuk digunakan oleh unit - unit dan Instansi - instansi ;
4. membantu pemantauan pelaksanaan Rencana Keuangan Program Jangka Menengah (PJM).
5. Membantu Unit Pengendali Keuangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam penyiapan

konsolidasi laporan keuangan proyek guna pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada setiap Tahun anggaran ;

6. Penyusunan laporan keuangan pelaksanaan proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu di Kabupaten Daerah Tingkat II sesuai PFAMS dan penyampaian laporan tersebut kepada :
 - a. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II ;
 - b. Unit Manajemen Program ;
 - c. Unit Pengendali Keuangan.

- Unit Manajemen Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan pencatatan dan pengelolaan keuangan Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu untuk dapat memberikan informasi mengenai keuangan proyek secara menyeluruh.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan P3KT secara teknis fungsional dilakukan oleh Instansi - instansi terkait dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan kewenangan tersebut, dibentuk susunan keanggotaan organisasi pengelolaan dan pelaksanaan P3KT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 523 tahun 1990 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk atau dari dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES Dati II).

Pasal 9

- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam Keputusan ini ;
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada Tanggal : 3 Agustus 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Drs. IBNU SALAM

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur

di Surabaya ;

3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propin-

si Dati I Jawa Timur ;

4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wi
layah/Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 7. Sdr. Kepala Biro Organisasi dan tata Lak
sana Sekretariat Wilayah/Daerah -
Tingkat I Jawa timur ;
 8. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 9. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah tingkat
II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah
Tingkat II nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Ting
kat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Para Pejabat yang bersangkutan untuk
mengetahui dan dilaksanakan sebagai-
mana mestinya.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 173 TAHUN 1992.
TANGGAL : 3 AGUSTUS 1992.

SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGANISASI PENGELOLA DAN PELAKSANA
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

1). SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI P3KT.

NOMOR	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Drs. Soebagio	Ketua I	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2	Drs. Moedjiono	Ketua II	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
3	Ir. Soeroso	Sekretaris	Kepala Dinas PU Kabupaten Nganjuk.
4	dr. Widiatmoko	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk.
5	Drs. Panut Iksan M.	Anggota	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Nganjuk.
6	Ir. H. Tiamun	Anggota	Kepala Cabang DPU Cipta Karya Nganjuk.
7	Yusuf Randa Bunga	Anggota	Direktur Utama PDAM Kabupaten Nganjuk.
8	L a h u r i	Anggota	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tk. II Nganjuk.
9	Sunu Purwanto, SH	Anggota	Kepala Bagian Pembangunan setwilda Tingkat II Nganjuk.
10	FX. Soedjito	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
11	W a r s i t o	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
12	Agus Susanto, SH	Anggota	Kepala Bagian Ortala Setwilda Tingkat II Nganjuk.
13	Drs. Masidi Tohir	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk.

2). SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT MANAJEMEN PROGRAM.

NOMOR	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Ir. Soelarso	Ketua	Kepala Bidang Fisik & Prasarana Bappeda Tingkat II Nganjuk.
2	Drs. M. Imron	Sekretaris	Kasi Perhubungan & Telekomunikasi Bappeda Tingkat II Nganjuk.
3	Sugeng	Anggota	Kasubag. Pelaksanaan dan Perencanaan Program Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

NOMOR	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4	Hadi Sutrisno, SH	Anggota	Kasubag. Tata Laksana Bagian Ortala Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5	Drs. Siswo Adhie	Anggota	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Operasional Dinas Pendapatan daerah Tingkat II Nganjuk.
6	Ir. Soekonjono	Anggota	Staf Kasi Perhubungan Bappeda Tingkat II Nganjuk.
7	Drs. S a r n o	Anggota	Kasi Tata Guna Tanah Bappeda Tingkat II Nganjuk.

3). SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT MANAJEMEN PELAKSANA PROYEK.

NOMOR	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Ir. Bangun	Ketua	Kasi Jalan Dinas PU Kabupaten daerah Tingkat II Nganjuk.
2	Drs. Sunaryo	Sekretaris	Kabag. TU Dinas PUK Tingkat II Nganjuk.
3	Harsono	Anggota	Kasubsi. Perencanaan Tehnis dan Leger Jalan Dinas PUK Tingkat II Nganjuk.
4	Subandi	Anggota	Staf Administrasi TU Dinas PUK Tingkat II Nganjuk.
5	Drs. Djoko Suseno	Anggota	Kasi Tata Bangunan dan Perumahan Dinas PUK Tingkat II Nganjuk.
6	Putut Muhartadi, BE	Anggota	Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas PUK Tingkat II Nganjuk.
7	Ir. Muslim	Anggota	Kasi Tata Kota dan Tata Daerah Dinas PUK Tingkat II Nganjuk.

4). SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT MANAJEMEN KEUANGAN.

NOMOR	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	W a r s i t o	Ketua	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
2	Dra. Kukasanah	Sekretaris	Kasubag. Anggaran Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

NOMOR	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3	Sariyanto	Anggota	Kaubag. Pembukuan Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
4	Slamet Setiono	Anggota	Kasubag. Perbendaharaan Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5	Sadimun	Anggota	Kasubag. Pembinaan Sumber Pendapatan Daerah Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.


 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 NGANJUK
 IBNU SALAM